





IKON JOGJA: Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro. Sampai saat ini keberadaan PKL ini masih menimbulkan persoalan, khususnya dengan pemilik toko. Padahal PKL-PKL ini menjadi salah satu daya tarik di Malioboro.

tanggung jawab" tegasnya.

Tidak hanya PKL liar, para pemilik toko di Malioboro yang tergabung dalam PPM juga mengaku memiliki bukti jual beli lapak di Malioboro. Saat pertemuan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIJ beberapa waktu lalu, perwakilan PPM Condoro membeberkan saat ini pemilik lapak PKL di Malioboro sebagian besar bukan warga ber-KTP Kota Jogja. Izin lapak tersebut sudah dijual ke warga luar DIJ. "Ada yang direlokasi ke

Abu Bakar Ali, akhirnya bisa kembali berjualan di Malioboro," ujarnya.

PPM masih ngotot pada 1 Mei 2019 nanti lahan di depan toko mereka harus bersih dari PKL. Itu karena keberadaan PKL di depan toko mereka menutupi tempat usaha. Selain itu PPM juga memiliki bukti berupa buku tanah dari Badan Pertanahan Nasional yang menunjukkan jika batas toko mereka hingga pinggir Jalan Malioboro. Tapi, lanjut dia, pada 1975 tiap toko di Malioboro diminta

untuk memundurkan bangunannya tiga hingga lima meter. Alasan Wali Kota Jogja saat itu Sudjono karena akan dibuatkan trotoar bagi pejalan kaki. "Nyatanya malah dipakai lapak PKL, kami hanya minta tanah hak kami itu dikembalikan," paparnya.

Kepala UPT Malioboro Ekwanto hingga kemarin belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. Telepon maupun pesan singkat melalui aplikasi belum direspons. (pra/din/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005